



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
ERA PRESIDEN BARACK OBAMA TERHADAP
PRAKTIK FORCED LABOUR DI INDUSTRI PERIKANAN THAILAND
2009-2014**

Muhammad Naufal Abdurrasyid

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Thailand is the third largest fishery products exporter to the United States. There are two Thailand's fishery products that has a large proportion of the United States imports, canned tuna controls 51% of the total imports and shrimp with 11%. Both products are the type of fish that is most widely consumed in the United States. Behind the magnitude of Thailand's role in the supply of fisheries products to the United States there is a fact that most of these products are produced through forced labor practices. Under its domestic law, namely Section 307 of the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930 the government prohibited to import products produced by forced labor, however the US government ignores the law and keeping the import policy towards Thailand. This study tries to analyze the policy by using descriptive analytical research. Based on wide range data related to the supply and consumption of fishery products in the United States along with realism theory argument about policy making that prioritize self-interest, this study found that US government policy to ignores their national law and keeping the import policy towards Thailand was influenced by their national interest to ensure food security for its people.

Keywords: *policy, fishery products, forced labour, national interests, food security*

PENDAHULUAN

Negara-negara di Asia Pasifik terkenal sebagai kawasan penghasil produk-produk perikanan terbesar di dunia. Sebut saja Tiongkok, Indonesia, Vietnam dan Thailand. Pada khususnya Thailand sejak pertengahan abad ke 21 sudah mulai gencar mengembangkan industri perikanan terutama dalam hal penangkapan ikan di laut lepas. Kini industri perikanan negara tersebut tetap menjadi salah satu negara penghasil produk-produk perikanan terbesar di dunia. Pada 2012 Thailand bahkan menempati urutan ketiga di dunia dalam jumlah ekspor produk-produk perikanan (FAO, 2014:21). Produk perikanan juga merupakan bagian penting dari keseluruhan total nilai ekspor Thailand, dengan menempati urutan ke 15 dari seluruh kategori produk dan urutan ketiga dibawah beras serta gula jika hanya produk pangan yang dihitung (MIT Media, 2012).

Besarnya nilai ekonomi dari industri perikanan Thailand ini menyebabkan dibutuhkannya tenaga-tenaga kerja untuk berbagai profesi di industri perikanan ini seperti nelayan, awak kapal penangkap ikan, buruh di tambak budidaya ikan tawar dan buruh di berbagai industri pemrosesan ikan serta bidang-bidang terkait lainnya. Pada 2012 misalnya,

jumlah warga Thailand yang bekerja di bidang perikanan berjumlah 415.300 orang. Untuk profesi nelayan sendiri, jumlahnya mencapai sekitar 100.000 orang (ILO, 2013). Jumlah ini belum ditambah oleh ribuan buruh migran yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Kamboja dan Laos. Negara-negara tersebut secara ekonomi memang tergolong sebagai negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga Thailand yang dalam data IMF tahun 2014 memiliki GDP per kapita \$5.450 tentunya memiliki daya tarik yang besar bagi masyarakat di negara Myanmar, Kamboja dan Laos yang hanya memiliki GDP per kapita sekitar \$900-\$1500 (IMF, 2014).

Dibalik besarnya nilai ekonomi dari industri perikanan Thailand ini, terdapat berbagai laporan tentang adanya praktik-praktik ilegal dalam berbagai kegiatan di industri perikanan Thailand tersebut. Salah satunya adalah praktik *forced labour* yang merupakan sebuah bentuk kerja paksa dimana seseorang tidak memiliki kontrak yang mewajibkannya untuk melakukan sebuah pekerjaan namun dipaksa untuk melakukannya dan akan diancam dengan berbagai hukuman jika tidak melakukan pekerjaan tersebut. Praktik *forced labour* ini selama bertahun-tahun menjadi sorotan dunia Internasional dalam industri perikanan Thailand tersebut.

Sebuah laporan tahunan yang dibentuk *Walk Free Foundation* (2014), menyebutkan bahwa Thailand menempati urutan ke 10 dunia dalam jumlah korban *slavery* terbanyak di dalam negaranya yaitu dengan jumlah 475.300 orang yang sebagian besar bekerja di sektor-sektor yang berkaitan dengan perikanan dan mayoritas dieksploitasi dalam bentuk *forced labour*. Bahkan menurut laporan tersebut jika secara khusus mengambil sampel dari buruh yang bekerja di kapal penangkap ikan atau nelayan maka di dapatkan data bahwa 16,9% dari 600 para buruh di Thailand yang di survei telah menjadi korban *forced labour*. Hal ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya *forced labour* dalam industri perikanan Thailand sangat tinggi.

Tingginya potensi terjadinya *forced labour* di Thailand ini berbanding terbalik dengan berbagai ratifikasi perjanjian internasional berkaitan dengan pemberantasan *forced labour* yang telah di ratifikasi pemerintah Thailand seperti *Convention concerning Forced or Compulsory Labour, 1930 (No.29)* dan *the Convention concerning the abolition of Forced Labour, 1957 (No.105)*. Dalam konvensi-konvensi tersebut negara yang meratifikasi diwajibkan melakukan segala upaya dalam mendukung pemberantasan *forced labour* tersebut. Masalah-masalah utama yang dihadapi Thailand dalam memberantas *forced labour* ini terletak pada korupsi berbagai elemen pemerintah yang terkait dan juga masih lemahnya upaya Thailand dalam memberantas *human trafficking* yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang mendorong terjadinya *forced labour*.

Adanya kaitan erat antara *human trafficking* dengan *forced labour* ini dijelaskan melalui pernyataan PBB dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto tahun 2000* sebagai berikut:

““*Trafficking in persons*” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;”

Berdasarkan pernyataan di atas kita dapat melihat bahwa PBB melalui konvensi tersebut mengaitkan antara kegiatan *Human Trafficking* dengan *forced labour*. Aktivitas kriminal

human trafficking dianggap sebagai salah satu penyebab adanya *forced labour* yang merupakan salah satu tujuan para kriminal tersebut melakukan *human trafficking*. Salah satu contohnya adalah di Provinsi Samut Sakhon Thailand, dimana pada 2010 33,6% dari migran Myanmar yang bekerja dalam industri perikanan di provinsi tersebut merupakan korban *human trafficking* dan 57,3 % diantaranya juga mengalami tindakan *forced labour* (ILO, 2013). Samut Sakhon merupakan salah satu pusat industri di Thailand khususnya industri perikanan. Sebagian besar penduduk di provinsi tersebut merupakan migran yang berasal dari Myanmar dan Kamboja. Bahkan dari 450.000 penduduk provinsi tersebut sebanyak 120.000 nya merupakan migran yang berasal dari Myanmar (UNIAP, 2010).

Ketidakmapuan Thailand dalam memberantas *Forced labour* membuat Thailand dimasukkan pada tingkat tiga dalam ranking pemberantasan *Human trafficking* dalam laporan *Trafficking in Person* pemerintah Amerika Serikat tahun 2014. *Trafficking in Person Report* merupakan laporan tahunan Pemerintah Amerika Serikat yang mengevaluasi atau menilai upaya pemerintah berbagai negara di dunia dalam memberantas *human trafficking* dan juga hal-hal yang terkait dengan *human trafficking* tersebut seperti *forced labour* dan *sex trafficking*. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pada 2013 17% buruh yang bekerja di kapal penangkap ikan Thailand mengalami tindakan *forced labour* (Department of Sates, 2014).

Tujuan utama pemerintah Amerika Serikat dalam membentuk laporan tahunan ini adalah untuk mendorong seluruh negara di dunia untuk memberantas segala macam elemen *trafficking*. Untuk lebih mengoptimalkan peran dari laporan ini maka pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sistem sanksi. Sanksi ini di berikan pada negara-negara yang berada dalam tingkat *tier* tiga dalam bentuk sanksi pemberhentian pemberian bantuan yang bersifat *non-humanitarian* dan *non-trade related* serta pemberhentian pemberian dana-dana pendidikan dan pertukaran budaya. Sanksi lainnya adalah dalam bentuk sikap oposisi pemerintah Amerika Serikat dalam lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pemberian bantuan dana terhadap negara dalam *tier* tiga tersebut.

Diturunkannya Thailand ke dalam peringkat *tier* tiga pada tahun 2014 lalu ternyata tidak serta merta membuat pemerintah AS memberikan sanksi. Padahal pemberian sanksi terhadap negara-negara yang tidak dapat memenuhi standar minimum pemberantasan *trafficking* ini merupakan hal yang diamanahkan dalam hukum di Amerika Serikat sendiri yang terkandung dalam *Trafficking and Violence Protection Act of 2000 Sec.110*. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut kebijakan untuk tidak memberikan sanksi ini memang sepenuhnya merupakan keputusan Presiden yang pada tahun 2014 dijabat Presiden Barrack Obama. Alasan terkait kebijakan untuk melepaskan sanksi tersebut tidak pernah secara resmi dijelaskan oleh pemerintah pusat Amerika Serikat.

Selain kebijakan sanksi terkait hukum *Trafficking and Violence Protection Act of 2000* tersebut yang tidak diimplementasikan, jika melihat laporan *Trafficking in Person* terhadap Thailand tersebut maka pemerintah Amerika Serikat hingga 2014 juga tidak mengimplementasikan hukumnya mengenai impor produk yang dibuat oleh para korban *forced labour*. Hukum tersebut tertuang dalam *Section 307 of the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930* yang merupakan salah satu undang-undang yang hingga kini berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut melarang segala impor produk yang dalam pembuatannya terdapat unsur-unsur *forced labour*. Namun dalam praktiknya sepanjang tahun 2009 hingga akhir 2014 pemerintah AS tiap bulannya tetap melaksanakan transaksi impor terhadap produk perikanan Thailand (NOAA, 2014).

Alasan mengenai kebijakan Amerika Serikat yang tidak memberlakukan larangan impor terhadap produk-produk perikanan Thailand terkait maraknya aktivitas *forced labour* di industri perikanan negara tersebut dari tahun 2009-2014 belum dijelaskan oleh secara resmi

pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Padahal kebijakan untuk memberlakukan larangan impor tersebut telah tertuang dalam undang-undang *The Smoot-Hawley Tariff Act of 1930*. Hal-hal diatas inilah yang kemudian membentuk suatu pertanyaan, mengapa selama tahun 2009-2014 pemerintah Amerika Serikat era Presiden Barack Obama tidak melaksanakan kebijakan larangan impor terhadap produk-produk perikanan Thailand yang dihasilkan melalui kegiatan *forced labour*?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menarik beberapa poin dalam perspektif realisme. Perspektif ini menganggap bahwa proses pelaksanaan politik berawal dari sifat manusia yang mementingkan diri sendiri, kemudian jika telah memiliki kekuasaan dalam lingkungan politik maka pemerintah selaku pemangku kekuasaan tersebut akan melaksanakan suatu kebijakan politik dengan mengedepankan aspek-aspek kebutuhan masyarakatnya dan kepentingan nasional.

Pengambilan kebijakan yang berdasar pada sifat yang mementingkan diri sendiri tersebut dapat menyebabkan pemerintah suatu negara mengabaikan kepentingan negara lain dan juga norma-norma yang menyangkut moral seperti hak asasi manusia. Hal ini ditekankan Morgenthau (2006:12-13) dengan menganggap bahwa dalam realisme politik sebuah tindakan atau kebijakan politik tidak selalu dapat berdiri bersama dengan nilai-nilai moralitas dan agama serta hukum. Sehingga sebuah tindakan dan kebijakan politik akan mengedepankan tujuan dan nilai-nilai politik yang ada dan dalam realisme tujuan dan nilai-nilai politik yang ingin dicapai adalah *national interest*.

Terkait dengan pandangan realisme di atas maka seperti yang dibahas pada penelitian mengenai kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk tidak menetapkan kebijakan larangan impor maka kebijakan ini sangat terpengaruh oleh berbagai interaksi dan ketergantungan AS terhadap Thailand. Sehingga walaupun terdapat isu moralitas yaitu tidak terpenuhinya hak-hak buruh dalam industri perikanan dengan adanya praktik *forced labour*, pemerintah Amerika Serikat tetap melakukan impor demi menjamin *national interest* mereka yaitu untuk menjamin *food security* di negaranya.

Food security atau bisa disebut juga dengan ketahanan pangan, merupakan bagian dari *Human Security* yang berfokus pada keamanan manusia dilihat dari sisi kebutuhan hidup manusia yang primer yaitu makanan. *Human security* sendiri merupakan sebuah pandangan yang mencoba membangun adanya kesadaran akan kondisi manusia itu sendiri sebagai sumber utama keamanan. Jika manusia tidak bebas dan sumber-sumber kehidupan tidak dapat terpenuhi maka ini merupakan ancaman terbesar bagi keamanan manusia. Sehingga pandangan ini sangat berfokus pada manusia itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Berikut adalah tipe-tipe *human security* dan jenis ancamannya:

Tabel 1.1 Tipe-tipe *Human Security* dan Ancaman Terhadapnya

Type of Security	Examples of Main Threats
Economic security	Persistent poverty, unemployment
Food security	Hunger, famine
Health security	Deadly infectious diseases, unsafe food, malnutrition, lack of access to basic health care
Environmental security	Environmental degradation, resource depletion, natural disasters, pollution
Personal security	Physical violence, crime, terrorism, domestic violence, child labor
Community security	Inter-ethnic, religious and other identity based tensions
Political security	Political repression, human rights abuses

Sumber: UNDP *Human Development Report*(1994)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa *food security* merupakan salahsatu bagian dari *human security* yang jika tidak terpenuhi akan dapat menimbulkan beberapa ancaman. Tanpa adanya suplai makanan tentunya keamanan manusia secara fisik akan terganggu. Bahkan dalam kondisi suplai makanan dapat terpenuhi saja keamanan bagi manusia pun belum terjamin apabila makanan yang ada tidak dapat memenuhi nutrisi dan kesehatan manusia itu sendiri.

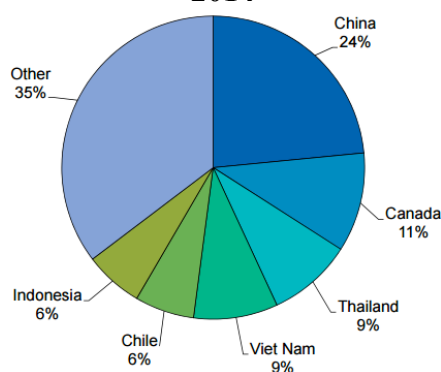
Dampak dari tidak terpenuhinya suplai makanan yang baik dan sehat ini adalah timbulnya bencana kelaparan, penyakit-penyakit fisik yang ditimbulkan karena kurangnya konsumsi makanan sehat dan juga berbagai penyakit-penyakit sosial yang timbul akibat kelangkaan suplai makanan tersebut. Keadaan-keadaan ini harus dapat dihindari suatu negara untuk memberikan ketahanan pangan atau *food security* bagi masyarakatnya.

PEMBAHASAN

Pada pendahuluan telah dijelaskan bahwa Thailand merupakan salah satu produsen produk-produk perikanan terbesar di dunia. Hingga tahun 2013 Thailand masih menempati urutan ketiga di dunia dalam jumlah ekspor produk-produk perikanan. Produk perikanan merupakan bagian penting dari keseluruhan total nilai ekspor Thailand, dengan menempati urutan ke 15 dari seluruh kategori produk dan urutan ketiga dibawah beras serta gula jika hanya produk pangan yang dihitung (MIT Media, 2012). Salahsatu negara tujuan utama ekspor Thailand adalah Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri masuk ke dalam dua kategori yaitu sebagai salah satu negara importir dan juga eksportir produk perikanan terbesar di dunia sejak tahun 2009 hingga 2013. Tahun 2009 nilai impornya mencapai \$13,8 milyar dan \$15,4 milyar pada 2010 yang kemudian terus meningkat tiap tahunnya. Amerika Serikat menempati peringkat pertama dalam besaran nilai impor dalam jangka waktu tersebut tiap tahunnya kecuali pada tahun 2012 dan bahkan pada tahun 2013 unggul jauh dari Jepang dengan nilai impor hampir mencapai \$19 milyar.

Grafik 1.1 Negara Exportir Produk Perikanan Terbesar ke Amerika Serikat Tahun 2014



Sumber: *National Oceanic and Atmospheric Administration* (2015)

Gambar diagram di atas menunjukkan negara-negara dengan presentase terbanyak terkait volume ekspor produk pangan perikanan ke Amerika Serikat pada tahun 2014. Tiongkok menguasai pasar Amerika Serikat dengan presentase 24% diikuti Kanada dengan 11% serta Thailand dan Vietnam diposisi ketiga dengan 9%. Hal ini menunjukkan bahwa Thailand juga merupakan salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat terkait produk pangan perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Besaran nilai transaksi impor Amerika Serikat terhadap Thailand pada tahun tersebut mencapai \$1,5 milyar, khusus untuk produk perikanan yang bersifat pangan. Bagi Thailand sendiri, Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor

terbesar dengan mencakup lebih dari 22% dari total nilai ekspornya di sektor perikanan (SEAFISH, 2015)

Terkait dengan tingginya nilai perdagangan produk perikanan antara Thailand dengan Amerika Serikat maka hal ini menunjukkan adanya peran penting Thailand bagi pemenuhan *national interest* Amerika Serikat yaitu *food security*. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa suatu negara dapat memenuhi *food security* bagi masyarakatnya yang tentunya berbanding terbalik dengan kondisi diatas (*food insecurity*). Berdasarkan definisi *Food Security* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, *Food security* merupakan kemampuan oleh semua anggota rumah tangga setiap saatnya untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk, hidup aktif dan sehat. Ketahanan pangan mencakup minimal: (1) Tersedianya sumber makanan bergizi yang aman dan mencukupi, (2) Memiliki jaminan kemampuan untuk memperoleh atau mengakses makanan dengan cara yang dapat diterima secara sosial (yaitu, tanpa menggunakan persediaan makanan darurat, memulung, mencuri, atau cara yang kurang layak lainnya) (USDA, 2006).

Kondisi-kondisi diatas merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh suatu negara demi menjamin kemandirian bagi masyarakatnya dari sisi *food security*. Ini merupakan salah satu aspek *human security* yang paling penting karena manusia bahkan tidak akan dapat hidup tanpa sumber kehidupan mereka yang utama yaitu makanan. Terkait penelitian ini, ikan merupakan salahsatu sumber makanan bergizi yang memiliki kadar protein tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ikan merupakan salahsatu pilihan sumber makanan bergizi yang perlu dipenuhi pemerintah Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat sendiri mengkonsumsi rata-rata 15 pon ikan dari tahun 2009 hingga 2014 (NOAA, 2015).

Jika meilihat indikator-indikator tersebut kita dapat melihat fakta di lapangan bahwa pada jenis produk pangan ikan, Amerika Serikat sangat bergantung pada produk perikanan impor. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Penggunaan Produk Perikanan dalam Masyarakat Amerika Serikat 2000-2014

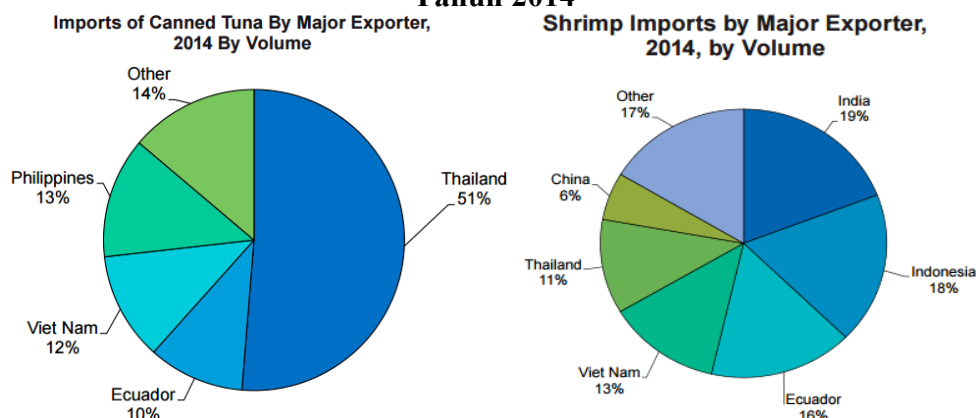
Year	Total population including armed forces overseas July 1 Million persons	U.S. supply Million pounds	Per capita utilization		
			Commercial landings	Imports	Total
			----- Pounds -----		
2000	282.3	17,338	32.1	29.3	61.4
2001	285.0	18,118	33.3	30.3	63.6
2002	288.4	19,028	32.6	33.4	66.0
2003	291.0	19,849	32.7	35.5	68.2
2004	293.9	20,412	32.8	36.5	69.3
2005	296.9	20,612	32.4	36.7	69.1
2006	299.8	20,960	31.6	38.3	69.9
2007	302.0	20,561	30.6	37.3	67.9
2008	304.5	19,201	27.3	35.9	63.2
2009	307.4	18,900	26.1	35.4	61.5
2010	310.1	19,748	26.5	37.1	63.6
2011	312.0	21,106	31.6	36.1	67.7
2012	314.3	20,757	30.7	35.4	66.1
2013	316.4	20,998	31.2	35.2	66.4
2014	318.9	21,050	29.7	36.3	66.0

Sumber: *National Oceanic and Atmospheric Administration (2015)*

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa produk perikanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Amerika Serikat adalah produk impor. Rata-rata dari tahun 2000 hingga 2014 suplai produk perikanan Amerika Serikat adalah 20 milyar pon, dimana dari tahun ke tahun produk perikanan impor yang dikonsumsi masyarakat memiliki proporsi yang

besar, bahkan sejak tahun 2002 hingga 2014 proporsi produk impor yang digunakan selalu lebih besar daripada produk perikanan yang ditangkap di dalam negeri. Selisih paling jauh terdapat pada tahun 2010 dimana penggunaan produk impor mencapai 37,1 pons per kapita sementara hasil tangkapan lokal hanya diangka 26,5 pons per kapita. Dalam jangka waktu 2009 hingga 2014, masyarakat Amerika Serikat menggunakan produk perikanan impor dengan presentase melebihi 50% tiap tahunnya dibandingkan penggunaan produk perikanan dalam negeri. Penggunaan produk perikanan impor bahkan memiliki presentase hingga 90% apabila hasil tangkapan ikan Amerika Serikat yang di ekspor untuk diolah dinegara lain kemudian diimpor kembali dihitung sebagai produk perikanan impor bagi pemerintah Amerika Serikat (SHF, 2015). Hal ini menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat terhadap produk impor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi produk perikanan masyarakatnya.

Grafik 1.2 Negara Exportir Tuna Kaleng dan Udang Terbesar ke Amerika Serikat Tahun 2014



Sumber: *National Oceanic and Atmospheric Administration (2015)*

Thailand sebagai eksportir terbesar ketiga bagi Amerika Serikat terkait produk perikanan memiliki porsi besar dalam pemenuhan konsumsi produk perikanan. Terlebih lagi ada dua jenis produk perikanan yang Thailand dominasi dalam hal proporsi impor oleh Amerika Serikat seperti yang terlihat pada gambar diagram diatas. Jenis produk pertama adalah produk tuna kalengan dimana Thailand sangat dominan dengan menguasai 51% atau setengah dari total impor Amerika Serikat. Produk kedua adalah udang, dimana Thailand menguasai 11% transaksi yang merupakan kelima terbesar diantara negara lain. Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa tuna dan udang merupakan dua jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat (NMFS, 2014). Berikut merupakan data proporsi konsumsi produk perikanan per jenisnya berdasarkan data terakhir pada 2014:

Tabel 1.3 Pola Konsumsi Ikan Masyarakat Amerika Serikat Tahun 2014

Top Seafood Products	
Species or Product	Amount Consumed in 2014
Shrimp	4.0 Pounds
Salmon	2.3 Pounds
Tuna	2.3 Pounds
Tilapia	1.4 Pounds
Alaska Pollock	0.98 Pounds
Pangasius (Basa or Swai)	0.69 Pounds
Cod	0.65 Pounds
Catfish	0.52 Pounds
Crab	0.51 Pounds
Clams	0.34 Pounds
Total For All Species	14.6 Pounds

Sumber: *National Marine Fisheries Services* (2014)

Tabel di atas menunjukkan jenis-jenis produk daging ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun 2014, dimana udang merupakan jenis produk daging ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Amerika Serikat dengan jumlah empat pon disusul salmon dan tuna dengan jumlah yang sama yaitu 2,3 pon. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Thailand mendominasi dua jenis produk perikanan yang Thailand yang diimpor oleh Amerika Serikat seperti yang terlihat pada gambar diagram diatas. Jenis produk pertama adalah produk tuna kalengan dimana Thailand sangat dominan dengan menguasai 51% atau setengah dari total impor Amerika Serikat. Produk kedua adalah udang, dimana Thailand menguasai 11% transaksi yang merupakan kelima terbesar diantara negara lain. Kedua produk perikanan ini merupakan dua jenis produk yang paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat.

Melihat data-data diatas kita dapat melihat bahwa perdagangan dengan Thailand merupakan kepentingan yang cukup vital bagi pemerintah Amerika Serikat dalam memenuhi *demand* masyarakatnya terkait dengan produk perikanan dan juga untuk menjamin *food security*. Terutama karena ikan adalah salahsatu sumber protein terbesar untuk memnuhi kebutuhan gizi yang merupakan indikator penting yang perlu dipenuhi dalam *food security*. Berdasarkan rekomendasi FAO, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik dibutuhkan konsumsi sekitar 26 pon ikan tiap tahunnya. Jika melihat data tahun 2010 hasil tangkapan ikan dalam negeri Amerika Serikat adalah 6,5 milyar pon sementara untuk memnuhi rekomendasi FAO maka dibutuhkan 7,2 milyar pon untuk sekitar 300 juta penduduk Amerika Serikat (NCBI, 2014). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut salahsatu jalan utamanya adalah dengan impor

Jika Amerika Serikat mengimplementasikan hukumnya melalui Section 307 of the *Smoot-Hawley Tariff Act of 1930*, maka tentunya pemerintah Amerika Serikat akan kehilangan sumber pangan di sektor perikanan. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut melarang impor terhadap produk perikanan yang diproduksi melalui kegiatan *forced labour*. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan pemerintah Amerika Serikat yang ingin memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan menjamin *food security*. Sehingga ini menjadi pertimbangan penting bagi Amerika Serikat terkait kebijakannya untuk tiidak memberlakukan larangan impor dari Thailand.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan analisis data dan informasi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa faktor *national interest* memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat tidak mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan produk perikanan dalam negeri sehingga tetap melaksanakan kebijakan impor terhadap produk perikanan Thailand demi menjamin *Food Security* bagi masyarakatnya yang merupakan salahsatu *national interests* negara tersebut walaupun mengetahui adanya praktik *forced labour* dalam industri perikanan Thailand selama 2009-2014.

Ketidakmampuan Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi produk perikanan dala negeri terlihat dari fakta bahwa dalam jangka waktu 2009 hingga 2014, masyarakat Amerika Serikat menggunakan produk perikanan impor dengan presentase melebihi 50% tiap tahunnya dibandingkan penggunaan produk perikanan dalam negeri. Penggunaan produk perikanan impor bahkan memiliki presentase hingga 90% apabila hasil tangkapan ikan Amerika Serikat yang di ekspor untuk diolah dinegara lain kemudian diimpor kembali dihitung sebagai produk perikanan impor bagi pemerintah Amerika Serikat (SHF, 2015). Hal ini menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat terhadap produk impor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi produk perikanan masyarakatnya.

Disisi lain Thailand merupakan eksportir terbesar ketiga bagi Amerika Serikat terkait produk perikanan dan memiliki porsi besar dalam pemenuhan konsumsi produk perikanan tersebut. Terlebih lagi ada dua jenis produk perikanan yang Thailand dominasi dalam hal proporsi impor oleh Amerika Serikat. Jenis produk pertama adalah produk tuna kalengan dimana Thailand sangat dominan dengan menguasai 51% atau setengah dari total impor Amerika Serikat. Produk kedua adalah udang, dimana Thailand menguasai 11% transaksi yang merupakan kelima terbesar diantara negara lain. Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa tuna dan udang merupakan dua jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat (NMFS, 2014).

Ketergantungan inilah yang membuat Amerika Serikat hingga 2014 tidak juga mengimplementasikan hukumnya mengenai larangan impor produk yang dibuat oleh para korban forced labour. Hukum tersebut tertuang dalam Section 307 of the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930 yang merupakan salah satu undang-undang yang hingga kini berlaku di Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat telah mengetahui adanya praktik forced labour di Thailand dengan memasukkan negara tersebut pada tingkat tiga dalam ranking pemberantasan human trafficking dalam laporan Trafficking in Person pemerintah Amerika Serikat tahun 2014.

Referensi

- Commercial Fisheries Statistics*. (2014). <http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/fus/fus14/index>. Diakses pada 19 Mei 2016.
- Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. (2013). <http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf>. Diakses pada 5 Juli 2015.
- Estimating Labour Trafficking: A Study of Burmese Migrant Workers in Samut Sakhon Thailand*. (2011) Dalam http://www.no-trafficking.org/reports_docs/estimates/uniap_estimating_labor_trafficking_report.pdf. Diakses pada 4 Juli 2015.
- Finnemore, Martha, & Kathryn Sikkink. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, Vol. 52, No. 4, Autumn. hlm. 898.
- Food security: concepts and measurement*. (2002). Dalam <http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm>. Diakses pada 9 Juli 2015.
- Forced Labour in Numbers*. (2012).

- Dalam http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_181961/lang-en/index.htm . Di akses pada 5 Juli 2015.
- Forced Labour Code*. (2008). Dalam <http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title18-section1589&edition=prelim> . Diakses pada 9 September 2015.
- Jackson, Robert, & Georg Sorensen. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 129.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York. McGraw-Hill. hlm. 12-13.
- OECD. (2015). *OECD Review of Fisheries: Country Statistics 2014*. Paris. OECD Publishing. hlm 473.
- Overview of the Seafood Industry* (2015). Dalam <http://www.seafoodhealthfacts.org/seafood-choices/overview-seafood-industry>. Diakses pada 17 Mei 2016.
- Products Exported by Thailand*. (2012). Dalam https://atlas.media.mit.edu/en/explore/tree_map/hs/export/tha/all/show/2012/ . Diakses pada 2 Juli 2015.
- Sakdiyakorn, Malinvisa. (2010). *Corruption, Human Trafficking and Human Rights: The Case of Forced Labor and Sexual Exploitation in Thailand*. hlm. 2. Dalam <https://www.nacc.go.th/images/journal/malinvisa.pdf>. Diakses pada 15 Mei 2016.
- Thailand Ethics Profile*. (2015). Dalam http://www.seafish.org/media/Publications/ThailandEthicsProfile_201509.pdf. Diakses pada 28 Februari 2016.
- Thailand Slavery Index*. (2014). Dalam <http://www.globalslaveryindex.org/country/thailand/> . Diakses pada 4 Juli 2015.
- The State of World Fisheries and Aquaculture*. (2014). Dalam <http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf> . Diakses pada 2 Juli 2015.
- Tsai, Yu-tai. (2009). *The Emergence Of Human Security: A Constructivist View*. *International Journal of Peace Studies, Volume 14, Number 2, Autumn/Winter*. hlm. 21-22. Dalam https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol14_2/TSAI%20-%202014n2%20IJPS.pdf . Diakses pada 9 Juli 2015.
- Trafficking in Person Report 2014*. (2014). Dalam <http://www.state.gov/documents/organization/226849.pdf>. Diakses pada 2 Juli 2015.
- U.S Fish Exports Record*. (2015). Dalam <http://www.fas.usda.gov/data/us-fish-and-seafood-exports-reach-record-levels>. Diakse pada 17 mei 2016.
- World Economic Outlook Database*. (2014). Dalam <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoselgr.aspx> . Diakses pada 2 Juli 2015 .